

VI. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dan telah dikemukakan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses perumusan kebijakan pembangunan patung Zainal Abidin Pagar Alam dibuat berdasarkan model Elite-Massa, konsekuensi model Elit-Massa menimbulkan resistensi (penolakan) masyarakat khususnya masyarakat Kabupaten Lampung Selatan.
2. Terdapat 2 alasan perumusan kebijakan pembangunan patung Zainal Abidin Pagar Alam yaitu sebagai pengembangan kota Kalianda sebagai kota modern dengan dibayangi obsesi seorang cucu terhadap kakek yaitu obsesi Rycko Menoza kepada Zainal Abidin Pagar Alam.
3. Pembangunan patung Zainal Abidin Pagar Alam dirumuskan oleh para aktor pembuat kebijakan. Aktor formal terdiri dari Bappeda (Eksekutif) Kabupaten Lampung Selatan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Selatan dan Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Lampung Selatan. Sedangkan aktor non formal yaitu masyarakat. Interaksi

aktor formal lebih menguasai perumusan kebijakan pembangunan patung Zainal Abidin Pagar Alam dari pada aktor non formal.

4. Penolakan masyarakat terhadap kebijakan pembangunan patung Zainal Abidin Pagar Alam disebabkan adanya ketidaksesuaian publik terhadap sosok Zainal Abidin Pagar Alam, karena Zainal Abidin bukan penduduk asli Kalianda dan adanya ketidaksesuaian isu kebijakan pembangunan patung Zainal Abidin Pagar Alam dengan kepentingan masyarakat

B. Saran

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisa terhadap permasalahan, maka peneliti memberikan saran terhadap kebijakan pembangunan patung Zainal Abidin Pagar Alam sebagai berikut:

1. Sebaiknya Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan harus lebih memperhatikan alasan-alasan yang tepat dalam perumusan kebijakan publik, alasan-alasan perumusan kebijakan yang dipilih harus dapat memecahkan permasalahan yang ada, sehingga masyarakat dapat merasakan manfaat dari kebijakan tersebut.
2. Sebaiknya interaksi aktor dalam perumusan kebijakan publik di Kabupaten Lampung Selatan harus seimbang antara aktor formal yaitu pejabat Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan dengan aktor non formal yaitu masyarakat. Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan harus membuka diri terhadap masukan dan aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat, sehingga

saluran komunikasi antara Pemerintah dan masyarakat lancar dan tidak menimbulkan anarkis.

3. Sebaiknya Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan lebih cermat dan hemat dalam menggunakan APBD untuk kesejahteraan masyarakat, anggaran APBD tersebut lebih dialokasikan dalam bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur jalan dan fasilitas umum.